

ABSTRAK

Nina Mahrida. 180102030081. *Partisipasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mewujudkan demokrasi pada pilkada tahun 2020 di masa pandemi covid-19.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah (Syiasah Syar'iyah). Pembimbing: I) Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. II) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pilkada HST 2020, Pandemi Covid-19.

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah agenda penting dalam demokrasi Indonesia. Perhelatan elektoral ini memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin mereka di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pada tanggal 9 Desember 2020, warga melakukan pencoblosan secara langsung di tempat pemungutan suara meskipun menghadapi tantangan akibat Pandemi Covid-19. Penelitian ini memfokuskan pada tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Hulu Sungai Tengah di masa pandemi tahun 2020.

Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Peneliti berada di lokasi penelitian selama satu bulan untuk mengumpulkan data mengenai pemilihan umum dan penanganan Pandemi Covid-19. Data-data ini disusun dan dianalisis terutama dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa pandemi Covid-19 secara mengejutkan tidak mengurangi partisipasi masyarakat Hulu Sungai Tengah dalam Pilkada tahun 2020. Sebanyak 81% pemilih menggunakan hak pilih mereka dalam ajang tersebut, menunjukkan peningkatan dari tingkat partisipasi sebelumnya pada Pilkada tahun 2015 yang kurang dari 77%. Peneliti mengemukakan empat alasan yang dapat menjelaskan tingginya tingkat partisipasi ini. Pertama, KPU Hulu Sungai Tengah menerapkan protokol kesehatan dan mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Kedua, masyarakat di Hulu Sungai Tengah secara umum tampaknya tidak terlalu khawatir akan kerumunan dan penyebaran virus Covid-19. Ketiga, adanya dua pemilihan langsung untuk gubernur dan bupati menunjukkan pergerakan politik yang signifikan dari tim sukses masing-masing calon untuk mendorong pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keempat, Hulu Sungai Tengah tidak terlepas dari praktik politik uang seperti daerah lainnya, yang mempengaruhi penggunaan hak pilih oleh masyarakat.